

Selamat datang, pasuruan.d185.3

Kabupaten Pasuruan | kabupaten



Hasil Evaluasi SAKIP - Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan

Hasil sementara evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan

Tahun : 2025

Periode : Final

Penanggung Jawab : Budi Prawira

PIC LKE : Willy Rifokto

Nilai Evaluasi	Tahun lalu	Tahun ini
Nilai Komponen Perencanaan Kinerja	24,04	23,94

Catatan :

1. Penetapan tujuan dan sasaran strategis RPJMD sudah cukup baik, dengan menetapkan kinerja yang berorientasi hasil serta indikator kinerja yang SMART. Namun, dalam penetapan target kinerja masih belum sepenuhnya baik, yaitu penetapan target berupa rentang, bahkan rentang yang ditetapkan masih di bawah baseline kinerja tahun 2024. Sebagai contoh, target kinerja pada indikator "Indeks Pembangunan Manusia" yang menetapkan target rentang dengan batas bawah lebih rendah dari capaian tahun 2024.
2. Penetapan tujuan dan sasaran strategis masih belum sepenuhnya berorientasi hasil pada level perangkat daerah (PD). Masih terdapat tujuan dan sasaran yang tidak spesifik, sehingga relevansi hubungan tujuan dan sasaran tidak cukup logis. Selain itu, masih terdapat indikator kinerja yang tidak SMART dan relevan untuk dikawal di level Renstra PD. Sebagai contoh pada perencanaan strategis Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Sosial dan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi.
3. Pohon kinerja pemda belum menggambarkan kontribusi PD lintas sektor dalam menunjang kinerja utama daerah. Pohon kinerja pemda cenderung masih

Nilai Evaluasi	Tahun lalu	Tahun ini
menjenjangan kinerja per urusannya saja, sebagai contoh pada penjenjangan kinerja terkait pendidikan. Selain itu, pohon kinerja belum sepenuhnya menggambarkan penjenjangan berdasarkan kinerja yang ditetapkan pada RPJMD, sehingga belum sepenuhnya tergambar penguraian kinerja strategis pemda sampai dengan level kinerja di perangkat daerah. 4. Keterkaitan logis antara tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan belum sepenuhnya tergambar. Rantai hasil (results chain) dari ultimate outcome, intermediate outcome, immediate outcome, hingga output tidak menunjukkan hubungan sebab-akibat yang runtut. Tidak ada informasi pohon kinerja PD berdasarkan Renstra 2025-2029. Hal ini menyebabkan arah perencanaan kinerja menjadi kurang jelas dalam menggambarkan bentuk intervensi instansi/unit kerja dapat menghasilkan perubahan yang diharapkan. 5. Berdasarkan potret pohon kinerja periode sebelumnya, pohon kinerja perangkat daerah belum menunjukkan adanya bentuk identifikasi crosscutting kinerja lintas perangkat daerah dalam menunjang terwujudnya kinerja utama. 6. Rencana aksi PD yang disusun sudah menunjukkan aktivitas yang menunjang pencapaian kinerja, namun belum ada penjabaran target capaian setiap triwulannya. Penjabaran rencana aksi yang dilakukan hanya sebatas pada jadwal pelaksanaannya saja, sehingga belum terukur progres capaiannya setiap triwulan. Rekomendasi : 1. Menyempurnakan kualitas penetapan target kinerja pada perencanaan kinerja dengan memastikan target kinerja yang spesifik berupa angka absolut yang bersifat progresif/meningkat setiap tahunnya. 2. Melakukan reviu terhadap rumusan kondisi kinerja pada tujuan dan sasaran strategis di level PD agar berorientasi hasil, serta melakukan reviu terhadap rumusan indikator kinerja yang ditetapkan agar bersifat SMART sehingga kinerja utama daerah dapat diukur keberhasilannya dengan baik. 3. Menyusun penjenjangan kinerja strategis pemda dengan mengacu perencanaan terbaru berupa pohon kinerja yang memperhatikan prinsip logis dan menggambarkan hubungan sebab akibat yang runtut. Instansi harus memastikan kontribusi lintas sektor tiap		

Nilai Evaluasi	Tahun lalu	Tahun ini
PD tergambar di dalam pohon kinerja dalam menunjang kinerja strategis daerah. 4. Instansi/ unit kerja perlu menyusun kembali keterkaitan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan berdasarkan alur logis sehingga setiap level kinerja menunjukkan hubungan sebab–akibat yang jelas. Rantai hasil harus menggambarkan bagaimana output berkontribusi pada immediate, intermediate, hingga ultimate outcome. 5. Melakukan identifikasi crosscutting kinerja lintas PD pada pohon kinerja dengan menetapkan kontribusi kinerja lintas PD yang terlibat secara spesifik pada tingkat kerjanya dalam menunjang pencapaian kinerja utama daerah. 6. Mendorong setiap PD menyusun rencana aksi kinerja berupa strategi pencapaian kinerja dengan menjabarkan langkah-langkah pencapaian kinerja konkrit dengan didukung target realisasi kerjanya setiap triwulan berdasarkan kinerja utama periode perencanaan terbaru.		
Nilai Komponen Pengukuran Kinerja	23,97	23,71
Catatan : 1. Belum semua PD menyampaikan dokumen IKU berdasarkan Renstra 2025-2029. Namun, berdasarkan potret format dokumen IKU yang disampaikan penjabaran informasi terkait IKU relatif lebih baik, sudah menyajikan definisi operasional, formulasi perhitungan, sumber data dan penanggung jawab. Namun kedalaman dalam penyajian definisi operasional belum sepenuhnya baik, sehingga belum memberikan ukuran/kriteria yang jelas terhadap indikator kinerja yang digunakan pada dokumen perencanaan. 2. Sampai dengan bulan Desember 2025 catatan ini dibuat, masih terdapat beberapa PD yang tidak tertib menyampaikan hasil pengukuran kerjanya, termasuk analisis permasalahan pencapaian kerjanya pada aplikasi SIMONEVA. Belum ada isian penjabaran target kinerja triwulanan dan hasil pengukurannya untuk setiap PD di lingkungan Pemkab Pasuruan pada setiap triwulannya. Sebagai contoh, pada isian pengukuran kinerja Dinas Pendidikan. 3. Belum ada mekanisme pemberian reward and punishment bagi setiap PD berdasarkan ketertiban dan capaian kinerja hasil pengukuran kinerja berkala,		

Nilai Evaluasi	Tahun lalu	Tahun ini
sehingga berdampak pada tidak efektifnya proses pengukuran kinerja berkala. Pengukuran Kinerja belum menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan. Rekomendasi : 1. Memastikan seluruh PD telah melakukan perbaikan pada format dokumen IKU untuk periode perencanaan 2025-2029, serta mendorong setiap PD untuk menjelaskan definisi operasional setiap indikatornya lebih detil agar menghindari mispersepsi dalam klaim perhitungan capaian kinerja. 2. Mendorong proses pengukuran kinerja secara berkala di lingkungan Pemkab Pasuruan dengan memanfaatkan aplikasi SIMONEVA, serta memastikan ketertiban setiap PD untuk melaporkan hasil pengukuran kinerjanya secara lengkap dan tepat waktu. 3. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai pertimbangan dalam pemberian reward and punishment kepada unit kerja untuk meningkatkan upaya pencapaian kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.		
Nilai Komponen Pelaporan Kinerja	12,19	12,08
Catatan : 1. Laporan kinerja Pemkab Pasuruan tahun 2024 belum menyajikan informasi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja dan analisis program/kegiatan untuk setiap indikatornya secara memadai. Selain itu, belum ada informasi strategi/upaya perbaikan pencapaian kinerja untuk periode berikutnya, terutama pada realisasi kinerja yang belum tercapai di tahun 2024. 2. Pada laporan kinerja tingkat perangkat daerah (PD), kualitas penyajian informasi atas analisis capaian kinerja belum merata. Masih terdapat beberapa PD yang belum menyajikan informasi analisis perbandingan/benchmarking kinerja dengan capaian standar nasional/provinsi/kabupaten kota lainnya, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan yang detil dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan. Rekomendasi :		

Nilai Evaluasi	Tahun lalu	Tahun ini
1. Melakukan revidi dan perbaikan kualitas informasi pada dokumen laporan kinerja pemda tahun 2024 dengan memastikan kelengkapan dan kedalaman poin analisis capaian kinerja sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri PANRB nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Revidi atas Laporan Kinerja 2. Melakukan revidi dan perbaikan kualitas informasi pada dokumen laporan kinerja serta menetapkan pedoman penyusunan pelaporan kinerja bagi PD agar melengkapi analisis capaian kinerja sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri PANRB nomor 53 tahun 2014.		
Nilai Komponen Evaluasi Internal	16,54	16,33

Catatan :

1. Inspektorat daerah telah melaksanakan evaluasi AKIP Internal atas implementasi SAKIP PD dengan mengacu pada Permenpan 88 tahun 2021. Namun, evaluasi yang dilakukan belum memberikan catatan yang spesifik dan konkrit terhadap setiap komponen SAKIP masing-masing PD. Catatan dan rekomendasi yang disampaikan masih sangat minim. Evaluasi internal belum berfokus memberikan catatan dan rekomendasi terhadap aspek kualitas dan pemanfaatan setiap komponen akuntabilitas kinerja.
2. Rekomendasi evaluasi yang disampaikan tidak sinkron dengan catatan evaluasi yang disampaikan pada LHE untuk setiap komponennya. Hal ini dapat berdampak pada kualitas tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh masing-masing PD karena bentuk rekomendasi yang tidak menjawab permasalahan yang menjadi catatan evaluasi.
3. Terdapat beberapa PD yang telah berusaha menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP Internal tahun 2024 dengan menyusun renaksi TL Evaluasi AKIP Internal. Namun belum semua PD menyusun rencana aksi perbaikan, sehingga belum dapat dipastikan progres TL hasil evaluasi yang telah dilakukan.

Rekomendasi :

1. Instansi disarankan memperkuat kapasitas evaluator internal dengan memberikan pemahaman yang jelas mengenai prinsip evaluasi berbasis hasil, cara membaca indikator, teknik analisis capaian, serta standar mutu evaluasi. Fokus evaluasi dapat didorong bukan hanya

Nilai Evaluasi	Tahun lalu	Tahun ini
pada aspek pemenuhan, melainkan didorong juga pada aspek kualitas dan pemanfaatan. Penguatan ini penting agar proses evaluasi menghasilkan analisis yang valid dan dapat ditindaklanjuti. 2. Memberikan rekomendasi evaluasi yang implementif berdasarkan setiap poin catatan evaluasi yang disampaikan, sehingga mempermudah setiap PD memahami dan menyusun langkah perbaikan kualitas SAKIP di unit kerjanya. 3. Mendorong seluruh PD menyusun rencana aksi perbaikan sebagai bentuk tindak lanjut evaluasi AKIP Internal tahun 2024. Selain itu, perlu dipastikan setiap proses perbaikan sudah sesuai dengan rekomendasi sehingga lebih berdampak pada perbaikan kualitas SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.		
Nilai Total Evaluasi AKIP Final	76,74	76,06

Hasil Capaian Indikator Makro	Tahun lalu	Tahun ini
Angka Kemiskinan	8,63	0,00
Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,34	0,00
Tingkat Pengangguran terbuka	5,02	0,00
Penurunan emisi GRK	0,00	0,00
Indeks Pembangunan Manusia	72,36	0,00
Indeks Gini Ratio	0,30	0,00
Pendapatan Perkapita	11.617,00	0,00

 [Download File Surat Pengantar LHE](#)

Hasil sementara evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan

Tahun : 2025

Periode : TW 2

Penanggung Jawab : Budi Prawira

PIC LKE : Willy Rifokto

Nilai Evaluasi	Tahun lalu	Tahun ini
Nilai Komponen Perencanaan Kinerja	24,04	22,10

Catatan :

1. Berdasarkan Rankhir RPJMD Pemkab Pasuruan 2025-2029, masih terdapat isu strategis daerah yang belum menjadi kinerja utama pada RPJMD, yaitu isu strategis terkait peningkatan kecukupan konsumsi pangan, isu kesehatan, dan pendidikan.

2. Penetapan tujuan dan sasaran strategis masih belum sepenuhnya berorientasi hasil. Masih terdapat tujuan dan sasaran yang tidak spesifik, sehingga relevansi hubungan tujuan dan sasaran tidak cukup logis. Selain itu, masih terdapat indikator kinerja yang tidak SMART dan relevan untuk dikawal di level RPJMD.

3. Belum ada informasi pohon kinerja level pemda dan perangkat daerah (PD) berdasarkan periode perencanaan terbaru pada esr.menpan.go.id atau pada link bukti dukung yang disampaikan pada matriks TL.

4. Sebagian PD sudah menyusun dan menyampaikan rencana aksi kinerja 2025 pada ESR. Namun berdasarkan rencana aksi yang disampaikan, belum semua PD menjabarkan target kinerja setiap triwulannya dengan baik. Masih terdapat PD yang hanya sebatas menjabarkan jadwal kegiatannya saja.

Rekomendasi :

1. Melakukan reviu terhadap penetapan kondisi kinerja pada tujuan dan sasaran strategis RPJMD 2025-2029 agar lebih berorientasi hasil dan sesuai dengan isu strategis daerah. Kemudian, memastikan setiap rumusan indikator kinerja di dalam RPJMD 2025-2029 bersifat SMART dan sesuai untuk mengukur kinerja di level Pemda berdasarkan kondisi kinerja yang ingin diwujudkan.

2. Melakukan reviu terhadap rumusan kondisi kinerja pada tujuan dan sasaran strategis agar berorientasi hasil, serta reviu terhadap rumusan indikator kinerja yang ditetapkan agar bersifat SMART sehingga kinerja

Nilai Evaluasi	Tahun lalu	Tahun ini
utama daerah dapat diukur keberhasilannya dengan baik. 3. Menetapkan penjenjangan kinerja mengacu perencanaan terbaru dengan menyusun pohon kinerja pemerintah daerah dan PD yang disusun dengan memperhatikan prinsip logis yang menggambarkan hubungan sebab akibat, serta menggambarkan faktor kritis keberhasilan untuk mempengaruhi pencapaian kondisi kinerja yang ditetapkan sebagaimana mengacu pada Permenpan 89 tahun 2021 tentang Pedoman Penjenjangan Kinerja. 4. Mendorong setiap PD menyusun rencana aksi kinerja berupa strategi pencapaian kinerja dengan menjabarkan langkah-langkah pencapaian kinerja konkrit dengan didukung target realisasi kinerjanya setiap triwulan berdasarkan kinerja utama periode perencanaan terbaru.		
Nilai Komponen Pengukuran Kinerja	23,97	23,97
Catatan : 1. Tabel IKU Pemda berdasarkan RPD 2024-2026 sudah dilengkapi dengan informasi definisi operasional. Untuk Dokumen IKU terbaru masih dalam proses menunggu RPJMD 2025-2029. Dokumen IKU PD berdasarkan RPD 2024-2026 juga sudah menyajikan informasi definisi operasional. 2. Berdasarkan matriks tindak lanjut, telah dilakukan desk pengisian aplikasi simoneva khususnya pada kolom isian faktor pendorong atau faktor penghambat dan rencana tindak lanjut. Namun Namun belum semua PD menyampaikan analisisnya pada aplikasi SIMONEVA. Selain itu, sampai dengan catatan evaluasi ini dibuat belum ada informasi hasil pengukuran kinerja berkala tahun 2025 pada aplikasi SIMONEVA. Belum ada isian penjabaran target kinerja triwulanan dan hasil pengukurannya untuk setiap PD di lingkungan Pemkab Pasuruan. Rekomendasi : 1. Memastikan format dokumen IKU di level Pemda dan perangkat daerah untuk periode perencanaan 2025-2029 sudah menyajikan informasi minimal dengan baik sebagaimana rekomendasi evaluasi Kementerian PAN RB tahun 2024. 2. Melakukan proses pengukuran kinerja secara berkala di lingkungan Pemkab Pasuruan dengan memanfaatkan		

Nilai Evaluasi	Tahun lalu	Tahun ini
aplikasi SIMONEVA, serta memastikan ketertiban setiap PD untuk melaporkan hasil pengukuran kinerjanya secara lengkap dan tepat waktu.		
Nilai Komponen Pelaporan Kinerja	12,19	12,08
Catatan : 1. Laporan kinerja Pemkab Pasuruan tahun 2024 belum menyajikan informasi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja dan analisis program/kegiatan untuk setiap indikatornya secara memadai. Selain itu, belum ada informasi strategi/upaya perbaikan pencapaian kinerja untuk periode berikutnya, terutama pada realisasi kinerja yang belum tercapai di tahun 2024. 2. Pada laporan kinerja tingkat perangkat daerah (PD), kualitas penyajian informasi atas analisis capaian kinerja belum merata. Masih terdapat beberapa PD yang belum menyajikan informasi analisis perbandingan/benchmarking kinerja dengan capaian standar nasional/provinsi/kabupaten kota lainnya, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan yang detil dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan.		
Rekomendasi : 1. Melakukan revidi dan perbaikan kualitas informasi pada dokumen laporan kinerja pemda tahun 2024 dengan memastikan kelengkapan dan kedalaman poin analisis capaian kinerja sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri PANRB nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Revidi atas Laporan Kinerja 2. Melakukan revidi dan perbaikan kualitas informasi pada dokumen laporan kinerja serta menetapkan pedoman penyusunan pelaporan kinerja bagi PD agar melengkapi analisis capaian kinerja sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri PANRB nomor 53 tahun 2014.		
Nilai Komponen Evaluasi Internal	16,54	16,54
Catatan : 1. Belum terdapat informasi hasil pelaksanaan evaluasi AKIP Internal tahun 2025 di lingkungan Pemkab		

Nilai Evaluasi	Tahun lalu	Tahun ini
Pasuruan. 2. Sebagian PD telah menyusun rencana aksi tindak lanjut hasil evaluasi AKIP Internal tahun 2024 dengan menyusun matriks perbaikan, namun belum ada informasi progres monitoring dan evaluasi progres perbaikan setiap PD. Rekomendasi : 1. Melanjutkan proses evaluasi AKIP Internal tahun 2025 di Pemkab Pasuruan dengan memastikan perbaikan kualitas evaluasi berdasarkan rekomendasi evaluasi Kementerian PAN RB tahun 2024. 2. Mendorong seluruh PD menyusun rencana aksi perbaikan sebagai bentuk tindak lanjut evaluasi AKIP Internal tahun 2024. Selain itu, perlu dipastikan setiap proses perbaikan sudah sesuai dengan rekomendasi sehingga lebih berdampak pada perbaikan kualitas SAKIP di lingkungan Pemkab Pasuruan.		
Nilai Total Evaluasi AKIP TW 2	76,74	74,69
Hasil Capaian Indikator Makro	Tahun lalu	Tahun ini
Angka Kemiskinan	8,63	0,00
Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,34	0,00
Tingkat Pengangguran terbuka	5,02	0,00
Penurunan emisi GRK	0,00	0,00
Indeks Pembangunan Manusia	72,36	0,00
Indeks Gini Ratio	0,30	0,00
Pendapatan Perkapita	11.617,00	0,00
 Download File Catatan Evaluasi		